KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM
Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303
Laman www.fh.ubb.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
Nomor : 2219/UN50/J/SP/2024

TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PENDEK
UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (UPPS)
DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI SI HUKUM
PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan tata organisasi dilingkup Fakultas Hukum dan untuk kelancaran kegiatan di Fakultas Hukum, per1u ditetapkan Rencana Pengembangan Jangka Pendek Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Dalam Mendukung Pengembangan Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024 - 2028;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 1221/UN50/KP/IX/2024 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Beiitung Periode Tahun 2024- 2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PENDEK UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (UPPS) DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI S1 HUKUM PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2024.

PERTAMA : Menetapkan Rencana Pengembangan Jangka Pendek Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Dalam Mendukung Pengembangan Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka
Pada Tanggal : 21 Oktober 2024
DEKAN,

JEANNE DARC NOVIAYANTI MANIK
NIPPPK. 197311052021212006

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tentang Rencana Pengembangan Jangka Pendek Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Dalam Mendukung Pengembangan Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2024

Nomor : 2219/UN50/J/SP/2024

RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PENDEK UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (UPPS) DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI S1 HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Disusun Oleh:

Tim Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

HALAMAN PENGESAHAN

Dokumen Rencana Pengembangan Jangka Pendek UPPS Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ini disahkan dan dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Balunijuk, Kabupaten Bangka
Pada Tanggal: 21 Oktober 2024

Mengetahui dan Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung

Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, S.H., M.Hum.
NIPPPK. 197311052021212006

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Pengembangan Jangka Pendek Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Periode 2024–2028 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai wujud komitmen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dalam mengarahkan, menyelaraskan, dan memfasilitasi pengembangan Program Studi S1 Ilmu Hukum secara terukur, sistematis, dan berkelanjutan. Berbasis pada siklus penjaminan mutu PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), dokumen ini memuat arah kebijakan, matriks program kerja, hingga mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) institusi.

Penyusunan rencana pengembangan ini selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Bangka Belitung serta merespons dinamika kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders), perkembangan hukum nasional, dan tuntutan standar penjaminan mutu pendidikan tinggi berbasis capaian pembelajaran (*Outcome-Based Education*).

Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh tim penyusun, Gugus Mutu Fakultas (GMF), Gugus Kontrol Mutu Internal (GKMI) Prodi, civitas akademika, serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan kerja keras hingga dokumen ini selesai dirumuskan.

Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan operasional yang efektif bagi seluruh unit kerja di lingkungan Fakultas Hukum UBB demi terwujudnya tata kelola akademik yang unggul, akuntabel, dan berdaya saing.

Bangka, Oktober 2024

Tim Penyusun Fakultas Hukum UBB

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan ..... **ii**

Kata Pengantar ..... **iii**

Daftar Isi ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **5**

A. Latar Belakang **5**

B. Dasar Penyusunan **6**

BAB II ARAH PENGEMBANGAN JANGKA PENDEK **7**

BAB III MATRIK RENCANA PENGEMBANGAN **9**

BAB IV MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI **13**

A. Pendekatan Evaluasi Berbasis Siklus PPEPP **13**

B. Pelaksana dan Instrumen Monitoring Evaluasi **13**

C. Mekanisme dan Jadwal Pelaksanaan Monitoring Evaluasi **14**

D. Tindak Lanjut dan Pelaporan **15**

BAB V PENUTUP **16**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan Program Studi (Prodi) S1 Ilmu Hukum merupakan suatu proses dinamis yang menuntut perencanaan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Di tengah dinamika hukum nasional maupun global serta tuntutan standar mutu pendidikan tinggi, keberhasilan prodi dalam mencetak lulusan yang berkualitas tidak dapat dilepaskan dari tata kelola yang terstruktur. Perencanaan strategis yang matang menjadi fondasi utama agar seluruh program pengembangan dapat berjalan secara efektif, efisien, serta memiliki tolok ukur capaian yang jelas dari tahun ke tahun.

Dalam konteks tersebut, Unit Pengelola Program Studi (UPPS) memegang peranan kunci dan strategis sebagai fasilitator utama pengembangan prodi. UPPS bertanggung jawab penuh dalam menyediakan dukungan serta kebijakan terpadu yang mencakup berbagai pilar utama Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola organisasi. Dukungan ini meliputi penguatan tata kelola dan penjaminan mutu, pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pendidik maupun kependidikan, peningkatan mutu pendidikan dan kurikulum, akselerasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), pembinaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta perluasan jaringan kerja sama strategis di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Kebutuhan pengembangan Prodi S1 Ilmu Hukum juga diwarnai secara kuat oleh karakteristik khas Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB). Sebagai lembaga pendidikan tinggi di wilayah kepulauan yang kaya akan sumber daya alam namun rentan terhadap isu lingkungan dan maritim, FH UBB memiliki komitmen moral dan intelektual untuk merespons tantangan hukum di daerah maupun nasional. Oleh karena itu, kurikulum dan fokus riset prodi diarahkan secara khusus pada penguatan hukum lingkungan, hukum pertambangan, dan peradaban hukum yang progresif tanpa mengesampingkan penguasaan ilmu hukum secara komprehensif.

Untuk menjamin agar seluruh langkah pengembangan berjalan secara teratur, implementasi program di tingkat Prodi S1 Ilmu Hukum secara konsisten diturunkan dari **Visi dan Misi Fakultas Hukum UBB** serta **Rencana Strategis (Renstra) FH UBB**

Tahun 2024–2028. Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap target operasional prodi—mulai dari penerapan kurikulum *Outcome-Based Education* (OBE), peningkatan publikasi riset bereputasi, perluasan advokasi masyarakat, hingga pencapaian Akreditasi Unggul—dapat terwujud secara optimal demi mendukung visi besar FH UBB sebagai pusat keunggulan hukum berwawasan lingkungan pada tahun 2035.

B. Dasar Penyusunan

Penyusunan Rencana Pengembangan Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, standar nasional pendidikan tinggi, serta dokumen rencana strategis internal yang relevan sebagai berikut:

1. **Landasan Yuridis (Regulasi Nasional)**
    1) **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012** tentang Pendidikan Tinggi.
    2) **Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014** tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
    3) **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023** tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
    4) **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020** tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (sepanjang instrumen dan turunan operasional masih relevan/berlaku).
2. **Landasan Internal Perguruan Tinggi (UBB & FH UBB)**
    1) **Statuta Universitas Bangka Belitung** yang berlaku**.**
    2) **Rencana Strategis (Renstra) Universitas Bangka Belitung Periodik.**
    3) **Rencana Strategis (Renstras) Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2024-2028.**
    4) **Surat Keputusan Dekan FH** UBB tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) Fakultas Hukum UBB.
    5) **Dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)** Universitas Bangka Belitung dan Fakultas Hukum UBB.

BAB II
ARAH PENGEMBANGAN JANGKA PENDEK

Arah pengembangan jangka pendek Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung berfokus pada penguatan fondasi tata kelola, peningkatkan mutu pendidikan, serta akselerasi capaian Tridharma Perguruan Tinggi. Berdasarkan Visi Misi dan Renstra FH UBB, arah pengembangan jangka pendek dibagi ke dalam 7 (tujuh) fokus utama:

1. **Penguatan Tata Kelola dan Penjamin Mutu,** mewujudkan tata kelola prodi yang akuntabel, transparan, dan berbasis Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) secara berkelanjutan. Adapun Focus Kegiatan meliputi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) proses pembelajaran dan ketercapaian *Capaian Pembelajaran Lulusan* (CPL) secara berkala. Penyusunan dan pembaruan Dokumen Evaluasi Diri (DED) serta Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dalam rangka persiapan Akreditasi Unggul dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) akademik dan kependidikan di tingkat prodi.
2. **Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM),** meningkatkan kualifikasi akademik, jabatan fungsional, dan kompetensi professional dosen serta tenaga kependidikan. Focus kegiatan, Mendorong dan memfasilitasi studi lanjut (S-3) bagi dosen tetap prodi. Akselerasi kenaikan jabatan fungsional dosen menuju Lektor Kepala dan Guru Besar. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi dosen (seperti Sertifikasi Mediator, Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan Asesor Kompetensi).
3. **Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kurikulum,** Memantapkan implementasi kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Focus Kegiatan meliputi Rekonstruksi dan penyesuaian Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berbasis OBE yang mengintegrasikan isu hukum lingkungan dan lokalitas. Pelaksanaan program Praktisi Mengajar/Kuliah Tamu secara rutin dengan menghadirkan pakar dan aparat penegak hukum. Dan Optimalisasi program MBKM mandiri maupun kementerian (magang instansi hukum, pertukaran mahasiswa, dan riset).
4. **Akselerasi Penelitian dan Publikasi Ilmiah,** Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil riset hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan hukum lingkungan. Fokus Kegiatan meliputi Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen (kolaborasi dosen-mahasiswa). Pendampingan penulisan artikel ilmiah bagi dosen dan mahasiswa

untuk publikasi pada jurnal terakreditasi SINTA dan bereputasi internasional dan Pelatihan dan fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas hasil penelitian hukum.

5. **Penguatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM),** Memproyeksikan keilmuan hukum untuk penyelesaian masalah hukum rill di masyarakat Bangka Belitung. Focus kegiatan meliputi Pembentukan dan pendampingan *Desa Binaan Kesadaran Hukum* secara berkelanjutan. Penguatan peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) / Klinik Hukum prodi dalam memberikan advokasi hukum kepada masyarakat rentan. Dan Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum terpadu berbasis isu lingkungan, pertambangan, dan hukum keluarga.
6. **Pembinaan Kemahasiswaan dan Alumni,** meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademik/non-akademik serta memperkuat jejaring alumni. Focus kegiatan meliputi Pembinaan intensif delegasi kompetisi peradilan semu (*Moot Court*), *Legal Opinion,* dan karya tulis ilmiah tingkat nasional. Pelaksanaan *Tracer Study* secara rutin untuk memantau waktu tunggu kerja dan keselarasan bidang kerja lulusan. Dan Pembentukan wadah komunikasi dan kontribusi alumni dalam bimbingan karir serta penyediaan peluang magang.
7. **Pengembangan Sarana Prasarana dan Kerja Sama,** Menyediakan fasilitas pembelajaran yang modern serta memperluas jejaring kemitraan strategis. Focus kegiatan Kegiatan meliputi Pembaruan dan pemanfaatan fasilitas Laboratorium Hukum (Ruang Peradilan Semu dan Ruang Mediasi) secara maksimal dan Penguatan kerja sama dengan mitra strategis (Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Kemenkumham, LBH, dan Pemerintah Daerah) yang terimplementasi nyata (*IA/MoA*).

BAB III
MATRIK RENCANA PENGEMBANGAN

Matriks Rencana Pengembangan Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Periode 2024–2028 disusun sebagai acuan operasional yang terukur. Matriks ini diturunkan langsung dari pilar strategis Renstra FH UBB untuk memastikan seluruh program kerja memiliki indikator capaian dan penanggung jawab yang jelas.

Table 3.1 Matriks Rencana Pengembangan Prodi S1 Ilmmu Hukum (2024-2028)

No	**Bidang Pengembangan**	**Program Kerja Stategis**	**Indikator Kinerja Utama/Sasaran**	**Target Capaian Tahunan**					**Penanggung Jawab**	**Dukungan UPPS (Fakultas)**
2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**						
1	Tata Kelola dan Penjaminan Mutu	Pemenuhan Standar Akreditasi Unggul	Terpenuhinya seluruh kriteria akreditasi LAPSES/BAN-PT	Penyusunan DED dan LKPS	Submit Dokumen Akreditasi	Pendampingan dan Asesmen	Re-Akreditasi	Peringkat Unggul	Kaprodi dan GKM Prodi	Pendampingan pakar/reviewer eksternal, alokasi anggaran operasional akreditasi
		Pelaksanaan SPMI & Monev Pembelajaran Berkelanjutan	Persentase mata kuliah yang di-Monev per semester (RPS & CPL)	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	GKM Prodi & Koor. Kurikulum	Penyediaan instrumen Monev terintegrasi dan koordinasi Gugus Mutu Fakultas
2	Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan Kualifikasi Akademik Dosen (S-3)	Persentase Dosen Tetap Prodi (DTP) berpendidikan Doktor (S-3)	**30%**	**35%**	**40%**	**45%**	**>50%**	Dekanat & Kaprodi	Skema beasiswa/insentif studi lanjut, izin belajar, dan alokasi dosen pengganti
		Akselerasi Jabatan Fungsional Dosen	Jumlah dosen dengan jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar	**LK: 30%**	**LK: +1 orang**	**LK: +2 orang**	**GB: +1 orang**	**GB: +2 orang**	Kaprodi & Tim PAK	Fasilitasi verifikasi berkas, klinik penulisan karya ilmiah, dan pendampingan PAK
		Peningkatan Sertifikasi	Jumlah dosen bersertifikat	**2 dosen**	**4 dosen**	**6 dosen**	**8 dosen**	**10 dosen**	Kaprodi	Alokasi dana pelatihan/sertifi

		Kompetensi Profesi Dosen	kompetensi (Mediator/Perancang UU/dll.)							kasi dan kerja sama dengan lembaga diklat terakreditasi
3	Pendidikan & Kurikulum	Reorientasi Kurikulum OBE Berbasis Hukum Lingkungan	Persentase RPS berbasis OBE & terintegrasi isu hukum lingkungan	**80%**	**100%**	**Evaluasi Pembelajaran**	**Pembaruan RPS/MK**	Full OBE & Integrasi Riset	Koor. Kurikulum	Penyelenggaraan workshop penyusunan RPS OBE dan pengadaan bahan ajar digital
		Program Praktisi Mengajar & Kuliah Tamu	Jumlah praktisi/pakar hukum yang mengajar di prodi per tahun	**2 kegiatan**	**4 kegiatan**	**4 kegiatan**	**6 kegiatan**	**6 kegiatan**	Koor. Kemahasiswaan & Praktis	Alokasi anggaran honorarium, fasilitas perkuliahan, dan fasilitasi MoA/IA mitra
		Implementasi MBKM Mandiri & Kementerian	Persentase mahasiswa aktif yang mengikuti kegiatan MBKM luar kampus	**15%**	**20%**	**25%**	**30%**	**>35%**	Pengelola MBKM Prodi	Pembukaan jejaring kemitraan magang instansi hukum dan penyetaraan SKS
4	Penelitian & Publikasi	Kolaborasi Riset Dosen dan Mahasiswa	Jumlah judul riset kolaboratif terpublikasi per tahun	5 judul	8 judul	10 judul	12 judul	15 judul	Koor. Riset Prodi	Skema Hibah Penelitian Internal Fakultas dan pendampingan metode riset
		Akselerasi Publikasi Jurnal Bereputasi & HKI	Jumlah artikel di SINTA 1–3/Scopus serta Sertifikat HKI	5 artikel / 2 HKI	8 artikel / 4 HKI	12 artikel / 6 HKI	15 artikel / 8 HKI	20 artikel / 10 HKI	Koor. Riset & Dosen DTP	Pemberian insentif publikasi ilmiah dan fasilitasi pendaftaran HKI
5	Pengabdian Masyarakat (PkM)	Penguatan Desa Binaan Kesadaran Hukum	Jumlah desa binaan aktif berbasis advokasi dan hukum lingkungan	1 desa	1 desa	2 desa	2 desa	3 desa	Koor. PkM & LKBH	Alokasi Hibah PkM Fakultas dan dukungan operasional pendampingan lapangan

		Layanan Advokasi & Bantuan Hukum Masyarakat	Jumlah kegiatan penyuluhan & bantuan hukum gratis (LKBH)	4 kegiatan	6 kegiatan	8 kegiatan	10 kegiatan	12 kegiatan	Pengurus LKBH FH UBB	Penyediaan sarana sekretariat LKBH, posko bantuan hukum, dan operasional
6	Kemahasiswaan & Alumni	Peningkatan Prestasi Lomba Hukum Mahasiswa	Jumlah raihan juara kompetisi tingkat nasional (*Moot Court*, KTI, *LO*)	2 juara	3 juara	4 juara	5 juara	6 juara	Pembina Kemahasiswaan	Dana pendampingan, dosen pembina khusus, dan biaya pendelegasian lomba
		Optimalisasi *Tracer Study* & Masa Tunggu Kerja	Persentase lulusan bekerja <6 bulan dengan pendapatan layak	70%	75%	80%	85%	>85%	Pengelola Alumni Prodi	Pengembangan Sistem Informasi *Tracer Study* dan penyelenggaraan *Job Fair*
7	Sarpras & Kerja Sama	Modernisasi & Optimalisasi Laboratorium Hukum	Tingkat pemanfaatan Ruang Peradilan Semu dan Mediasi	80%	90%	100%	Peremajaan Alat	Laboratorium Digital/Modern	Kepala Lab. Hukum	Pemeliharaan berkala, pengadaan perangkat sidang virtual, dan peremajaan fisik
		Perluasan Kerja Sama Strategis Berdampak (IA)	Jumlah dokumen *Implementation Arrangement* (IA) aktif per tahun	3 IA	5 IA	5 IA	7 IA	10 IA	Koor. Kerja Sama Prodi	Inisiasi MoU/MoA tingkat fakultas dengan APH, Pemda, dan mitra internasional

BAB IV

MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI

A. Pendekatan Evaluasi Berbasis Siklus PPEPP

Untuk memastikan Rencana Pengembangan Program Studi S1 Ilmu Hukum tidak sekadar menjadi dokumen formalitas, keterlaksanaan dan ketercapaian target IKU/IKS dikawal secara ketat melalui siklus penjaminan mutu PPEPP (*Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan*):

1. **Penetapan (*Setting*),** UPPS bersama Prodi menetapkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang tertuang dalam Matriks Rencana Pengembangan serta Rencana Operasional (Renop) tahunan.
2. **Pelaksanaan *(Implementation)*,** Pelaksanaan program kerja oleh unit/penanggung jawab yang ditunjuk dengan mengoptimalkan alokasi sumber daya dari UPPS.
3. **Evaluasi (*Evaluation*),** Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan Monitoring & Evaluasi (Monev) secara berkala oleh Gugus Kontrol Mutu Internal (GKMI) Prodi dan Gugus Mutu Fakultas (GMF).
4. **Pengendalian (*Control*),** Pembahasan hasil evaluasi dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tingkat fakultas untuk menganalisis deviasi capaian dan merumuskan langkah korektif (*corrective action*).
5. **Peningkatan (*Improvement*):** Pembaruan dan pematangan standar mutu atau target operasional untuk siklus perencanaan berikutnya.

B. Pelaksana dan Instrumen Monitoring Evaluasi

1. **Tim Pelaksana,** terdiri dari :
   a) Gugus Mutu Fakultas (GMF) & GKMI Prodi, Bertanggung jawab menyusun instrumen, melakukan penilaian berkala, serta menyusun Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Prodi.
   b) Auditor Internal UBB, Melakukan Audit Mutu Internal (AMI) secara independen minimum 1 (satu) kali dalam sehitung tahun akademik.
   c) Pimpinan UPPS (Dekan & Para Wakil Dekan), Menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dalam RTM dan mengalokasikan dukungan pemecahan masalah.

2. **Instrumen,** instrument yang digunakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi meliputi:
   a) Formulir Capaian IKU/IKT Prodi, Lembar kerja pengukuran berbasis indikator kuantitatif untuk mencatat ketercapaian target bulanan/semesteran.
   b) Instrumen Audit Mutu Internal (AMI), Lembar kerja audit kualitatif dan kuantitatif standar perguruan tinggi untuk menguji kesesuaian antara rencana operasional, standar mutu SPMI, dan kesiapan bukti fisik (*eviden*).
   c) Kuesioner Kepuasan Pemangku Kepentingan, Survei periodik (daring/luring) untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, serta pengguna lulusan (*stakeholder*).
   d) Matriks Analisis Deviasi & Rencana Tindak Lanjut (RTL), Format pendokumentasian akar masalah (*root cause analysis*) atas target yang belum tercapai beserta rekomendasi tindakan korektif untuk RTM.

C. Mekanisme dan Jadwal Pelaksanaan Monitoring Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis dan berkala dengan pembagian peran sebagai berikut:

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana	Waktu Pelaksan	Luaran (*output)*
1	Monev Operasional Rutin	GKMI Prodi & Koorprodi	Setiap Triwulan	Laporan Progres Capaian Kegiatan
2	Survei Kepuasan Stakeholder	GMF & GKMI	Akhir Semester	Laporan Hasil Survei Kepuasan
3	Audit Mutu Internal (AMI)	Auditor Internal UBB	1 Kali per Tahun Akademik	Laporan Hasil Audit (LHA) & Daftar Temuan
4	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Pimpinan UPPS, GMF, & Prodi	Pasca Pelaksanaan Ami	Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL)
5	Pengendalian & Peningkatan Standar	Dekan & Senat Fakultas	Awal Tahun Akademik Baru	Pemutakhiran Standar SPMI/Renop

D. Tindak Lanjut dan Pelaporan

1. **Penyusunan Laporan Evaluasi:** GMF mengompilasi seluruh data monev dan hasil temuan AMI menjadi **Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Prodi**, yang kemudian diserahkan kepada Dekan sebagai dasar pengambilan keputusan.
2. **Tindakan Korektif (*Corrective Action*):** Untuk target IKU/IKT yang belum tercapai (*underperformed*), Pimpinan UPPS menerbitkan keputusan berupa alokasi dukungan sumber daya, perbaikan sistem/SOP, atau pendampingan khusus.
3. **Umpan Balik Perencanaan (*Continuous Improvement*):** Hasil evaluasi dijadikan masukan utama dalam penyusunan Rencana Operasional (Renop) dan alokasi anggaran UPPS untuk periode/tahun anggaran berikutnya.

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Pengembangan Jangka Pendek Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Periode 2024–2027 ini disusun sebagai acuan operasional dalam mengawal ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Program Studi S1 Ilmu Hukum.

Keterlaksanaan seluruh program kerja dalam dokumen ini sangat bergantung pada komitmen bersama antara pimpinan UPPS, pengelola Program Studi S1 Ilmu Hukum, dosen, tenaga kependidikan, serta pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dengan pengawasan berkala melalui siklus penjaminan mutu PPEPP dan evaluasi terintegrasi, dokumen ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola akademik yang akuntabel, unggul, serta berkelanjutan.